



# **PERATURAN LURAH PUCUNG**

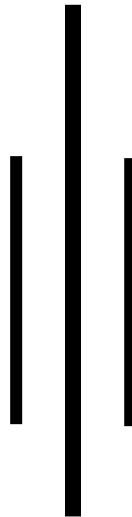
**NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

**(APBKal)**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN : PUCUNG**

**KAPANEWON : GIRISUBO**

**KABUPATEN : GUNUNGKIDUL**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH PUCUNG  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
PERATURAN LURAH PUCUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUCUNG,

Menimbang: bahwa sesuai ketentuan Pasal Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
19. Peraturan Desa Pucung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Pucung Tahun 2018 Nomor 5);  
Peraturan Desa Pucung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pucung Tahun 2019 Nomor 5 );
20. Peraturan Desa Pucung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pucung Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucung Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 1 );
22. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Asli Kaluraha Rp 3.500.000

Transfer Rp 1.707.606.900

Pendapatan lain-lain Rp 182.500.000

JumlahPendapatan Rp 1.893.606.900

Belanja Kalurahan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp 1.071.726.842

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp 542.581.500

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 54.734.500

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 15.450.000

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan

Rp 284.700.000

Jumlah Belanja Rp 1.969.192.842

Surplus/(Defisit) Rp (75.585.942)

Pembiayaan Kalurahan

PenerimaanPembiayaan Rp 75.585.942

Pengeluaran Pembiayaan Rp 0

Selisih Pembiayaan ( a – b) Rp 75.585.942

SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Pucung.

Ditetapkan di Pucung  
pada tanggal 15 Desember 2020

LURAH,



ESTU DWIYONO

Diundangkan di Pucung  
pada tanggal

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eko Sujarno', written in a cursive style.

EKO SUJARNO  
BERITA KALURAHAN PUCUNG TAHUN 2020 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN  
 PUCUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.707.606.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	182.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.893.606.900,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>42,00</u></b>	
1	<b>1.1.</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>801.675.588,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Belanja	567.665.600,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Pegawai	567.665.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.478.832,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.478.832,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	83.931.156,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.931.156,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.300.000,00	ADD, DLL
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.200.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Belanja	12.300.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Barang dan Jasa	12.300.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>6.600.000,00</b>	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3.600.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.000.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>15.570.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) Belanja	4.920.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Barang dan Jasa	4.920.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	5.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin Belanja	5.150.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Barang dan Jasa	5.150.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>105.158.468,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.150.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.864.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.864.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.745.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.745.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.794.468,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.794.468,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.282.000,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.282.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.950.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.871.600,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Desa Belanja Barang dan	2.871.600,00	
1.4.08		Jasa	20.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Pengisian perangkat desa	12.000.000,00	
1.4.91		Belanja Barang dan Jasa	15.360.400,00	PBH
1.4.91	5.2.	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	15.360.400,00	
1.4.92		Belanja Barang dan Jasa	6.741.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa Belanja	6.741.000,00	
1.4.93		Barang dan Jasa	33.900.000,00	PAD
1.4.93	5.2.		33.900.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>146.672.786,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin Belanja	145.420.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Barang dan Jasa Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	145.420.000,00	
1.5.06		Belanja Barang dan Jasa	1.252.786,00	DLL
1.5.06	5.2.		1.252.786,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>00,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>93.815.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	24.000.000,00	
2.1.02			18.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa Belanja	48.815.500,00	DDS
2.1.90	5.3.	Modal	48.815.500,00	
2.1.92		Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa Belanja	3.000.000,00	PAD
2.1.92	5.2.	Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>217.171.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	88.725.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan	88.725.000,00	
2.2.04		Desa Siaga Kesehatan Belanja Barang dan	15.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Jasa	15.850.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Belanja	5.150.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Barang dan Jasa	5.150.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat Belanja	14.610.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Barang dan Jasa	14.610.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	8.731.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.731.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	78.955.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.955.000,00	
2.2.99		Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) Belanja	5.150.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Barang dan Jasa	5.150.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>175.000.000,00</b>	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	175.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>52.525.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat Belanja	52.525.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Barang dan Jasa	52.525.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>4.070.000,00</b>	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa Belanja	4.070.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Barang dan Jasa	4.070.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>00.00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>34.514.500,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	5.550.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan Belanja	24.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	2.364.500,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.364.500,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	2.600.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.550.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.550.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.070.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.990.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.080.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Operasional	7.080.000,00	
3.4.95		LPMD dan/atau LPMD Belanja Barang	2.550.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	dan Jasa Operasional PKK	2.550.000,00	
3.4.96		Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	2.450.000,00	
<b>4</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>00,00</b>	
<b>4.3.</b>		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	<b>4.150.000,00</b>	
4.3.02		Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	4.150.000,00	
<b>4.6.</b>		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	<b>7.950.000,00</b>	
4.6.02		Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.550.000,00	
4.6.99		Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	4.400.000,00	
<b>5</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>00,00</b>	
<b>5.1.</b>		Kegiatan Penanggulangan Bencana Belanja	<b>7.500.000,00</b>	
5.1.01		Tidak Terduga	7.500.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	7.500.000,00	
5.2.		Penanganan Keadaan Darurat	<b>277.200.000,00</b>	
5.2.01		Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	DDS
5.2.01	5.4.		277.200.000,00	

JUMLAH BELANJA
----------------

1.969.192.842,00
------------------

